

# Wakil Wali Kota Bima Hadiri HUT Damkar Ke 106 Tingkat Provinsi NTB

Kamis, 15 Mei 2025, Administrator



Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyon, SH menghadiri upacara Hari Ulang Tahun ke-106 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis, 15 Mei 2025.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK) Kementerian Dalam Negeri RI, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, Bupati Lombok Timur, Bupati Bima, Bupati Dompu, serta Wakil Bupati Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Direktur MPBK Drs. Edy Suharmanto, M.Si menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian jajaran Damkar dalam memberikan pelayanan penyelamatan dan penanggulangan bencana kebakaran di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi NTB.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas personel, penguatan sarana prasarana, serta sinergi antar daerah dalam menghadapi tantangan kebencanaan dan keselamatan masyarakat.

Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam mendukung profesionalisme Damkar sebagai garda terdepan dalam penanggulangan musibah kebakaran dan penyelamatan.

Wakil Wali Kota Bima menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kota Bima terhadap upaya peningkatan kapasitas layanan Damkar dan penyelamatan di seluruh NTB. Ia juga mengapresiasi kerja keras personel Damkar yang senantiasa hadir di tengah masyarakat dalam kondisi darurat.

# Sekda Kota Bima Pimpin Rakor Strategi Penguatan Menuju UHC Tingkat Kota Bima

Senin, 19 Mei 2025, Administrator



Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH memimpin forum komunikasi terkait strategi penguatan rekrutmen cakupan dan keaktifan peserta menuju UHC tingkat Kota Bima bersama BPJS Kesehatan Cabang Bima, pada Senin, 19 Mei 2025.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Sekda Kota Bima tersebut di hadiri oleh Sekda Kota Bima, Kepala Dukcapil, Kepala Bappeda, Kepala Inpektorat, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dikpora, dan Kabid Limjamsos Dinas Sosial Kota Bima, serta turut dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima.

Capaian peserta aktif Kota Bima sampai dengan 1 Mei 2025 sebanyak 147.457 jiwa (89.31 % dari total penduduk 165.113 jiwa). Pada tahun 2025, target cakupan UHC dan tingkat keaktifan kepesertaan minimal 98% dan 80% dari jumlah penduduk.

Kendati demikian, masih terdapat catatan yang harus diperbaiki dan adanya dukungan semua pihak, terutama adanya dukungan dari organisasi perangkat daerah untuk mendukung realisasi UHC Tingkat Kota Bima tahun 2025 berjalan sesuai standar cakupan kepesertaan JKN.

Selain itu, sinkronisasi data penerima manfaat JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah harus tersistematis. Seperti Peserta PBI JK yang dinonaktifkan karena NIK tidak valid atau data ganda, bayi baru lahir tanpa NIK yang dinonaktifkan Kementerian Sosial, peserta PPU BU dan PBU Mandiri menunggak iuran dan peserta PBU Pemerintah Daerah yang dinonaktifkan akibat meninggal dunia, pindah keluar domisili dan NIK tidak valid.

Dengan sinkronisasi data masyarakat penerima iuran JKN yang dibebankan melalui APBD, diharapkan tidak terjadi kebocoran APBD. Dengan kata lain, pemerintah daerah

tidak lagi membayar iuran kepada peserta yang sudah meninggal dunia, pindah keluar domisili dan NIK tidak valid.

Angka bayi baru lahir tanpa NIK di Kota Bima yang merupakan peserta PBI JK sejumlah 488 jiwa. Sesuai UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 pasal 27 yaitu pada ayat 1 setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dukcapil paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan dimaksud pada ayat 1, Dukcapil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Selain itu, masih terdapat peserta menunggak karena alih segmen kepesertaan, seperti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 148 orang dan PNS sejumlah 18 orang. Dengan sinkronisasi ini, diharapkan peserta yang telah alih segmen menjadi PNS dan PPPK dapat meneruskan menjadi peserta aktif, agar menjamin keberlanjutan kepesertaan.

Untuk biaya manfaat pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan di faskes Kota Bima tahun 2024 sebesar Rp. 90.7 miliar. Biaya sampai dengan April 2025 telah dibayarkan sebesar Rp. 33.8 miliar, dan Kapitasi ke Puskesmas sebesar Rp. 3.6 miliar. Sementara untuk RSUD Kota Bima klaim telah dibayarkan sampai dengan klaim bulan November 2024.

Dalam forum ini juga, dibahas potensi kecurangan rujukan tidak sesuai FKTP non Jarkomdat tahun 2024-2025. Seperti menggunakan kartu BPJS orang lain atau peserta yang telah meninggal namun status kepesertaannya masih aktif. Sebagai langkah pencegahan, diharapkan dukungan pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan untuk penindakan pencegahan kecurangan.

Potret peyanaan tahun 2024 tentang pengaduan peserta. Pengaduan yang paling tinggi adalah terkait obat yang tidak tersedia di faskes sehingga peserta harus mencari obat sendiri, adanya biaya tambahan di faskes diluar ketentuan, serta praktek dokter yang tidak sesuai dengan jadwal dokter di HFIS.

Sekretaris Daerah Kota Bima, H Mukhtar menghimbau kepada pimpinan organisasi perangkat daerah agar menginstruksikan kepada PNS dan PPPK di tiap OPD untuk melakukan pelunasan tunggakan secara mandiri.

Mukhtar juga berharap dan mendorong Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bima untuk melakukan optimalisasi pemutakhiran atau verifikasi data peserta, baik yang telah meninggal dunia, pindah keluar domisili maupun NIK tidak valid.

Sekretaris Daerah juga berharap kepada Dinas Kesehatan Kota Bima untuk mengoptimalkan digitalisasi layanan, baik di puskesmas maupun rumah sakit untuk antrean online ataupun klaim, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi Mobile JKN sebagai identitas kepesertaan.

# Asisten I Setda Kota Bima Pimpin Rapat Koordinasi Lurah dan Camat, Bahas Persiapan Lomba Kebersihan Tingkat Provinsi NTB

Selasa, 06 Mei 2025, Administrator



Asisten I Setda Kota Bima memimpin rapat koordinasi bersama para lurah dan camat dalam rangka persiapan lomba kebersihan tingkat kelurahan, Selasa, 06 Mei 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pemerintah Kota Bima. Rapat ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk mempersiapkan kelurahan yang akan mewakili kota dalam lomba kebersihan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun ini.

Asisten I Setda Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.AP menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima harus memilih satu kelurahan terbaik untuk mewakili kota dalam lomba tingkat provinsi. Pemilihan tersebut dijadwalkan pada 15 Mei 2025, sementara pengumuman pemenang tingkat provinsi akan dilakukan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam arahannya, H. Alwi menekankan pentingnya optimalisasi pelaksanaan program Clean and Green, yakni upaya menciptakan kota yang bersih dan hijau melalui keterlibatan aktif masyarakat. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak wilayah yang belum bergerak maksimal dalam mendukung program tersebut.

“Program Clean and Green ini bukan hanya soal keindahan, tapi juga bagaimana kita menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan, menanam tanaman, dan gotong royong secara berkelanjutan,” ujar Asisten I.

Lomba kebersihan lingkungan ini akan diikuti oleh seluruh kelurahan. Penilaian akan difokuskan pada partisipasi aktif masyarakat, kebersihan lingkungan dari sampah, penanganan air tergenang, serta kolaborasi antara lurah, RT, RW, dan masyarakat setempat. Karena itu, para lurah diminta segera merapatkan barisan dan menggerakkan warganya untuk memulai kegiatan bersih-bersih secara rutin.

Selain membahas lomba kebersihan, Beliau juga menyinggung mengenai penyediaan Program Keluarga Harapan (PKH) daerah, khususnya untuk penyandang disabilitas. Lurah diminta untuk melakukan pendataan dengan tepat agar bantuan yang diberikan sesuai sasaran dan tepat guna.

“Aspek terpenting dari lomba kelurahan ini bukan hanya mengejar predikat juara, tetapi bagaimana kita membangun budaya peduli lingkungan dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Rapat ditutup dengan ajakan agar mulai hari ini, seluruh pihak bergerak melakukan pembersihan. Diharapkan, dalam beberapa hari ke depan, sudah ada kegiatan nyata yang dilakukan di lapangan sebagai bentuk komitmen menyongsong lomba Kebersihan kelurahan/desa tingkat Provinsi NTB.

## Rapat Paripurna DPRD Kota Bima, Tandai Penutupan Masa Sidang II dan Pembukaan Masa Sidang III Tahun Dinas 2025

Selasa, 20 Mei 2025, Administrator



Kota Bima, 20 Mei 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Muhtar Landa, MH menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima dengan agenda penutupan Masa Sidang II dan pembukaan Masa Sidang III Tahun Dinas 2025. Rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Bima dan dihadiri oleh

para anggota dewan, Staf Ahli, Asisten, seluruh Kepala OPD, seluruh Kabag, Camat serta Lurah se Kota Bima.

Rapat dibuka langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm, yang menyampaikan capaian kegiatan selama Masa Sidang II serta menyusun arah kebijakan pembahasan di Masa Sidang III. Dalam sambutannya, Ketua DPRD menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Sekda Kota Bima dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas kinerja DPRD selama Masa Sidang II, khususnya dalam pengawasan dan dukungan terhadap program pemerintah daerah. Ia juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Bima dalam menjalin kerja sama yang lebih produktif di Masa Sidang III.

“Pemerintah Kota Bima siap melanjutkan kemitraan strategis dengan DPRD Kota Bima untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai rencana, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Setelah penutupan masa sidang II Tahun Dinas 2025, rapat dilanjutkan dengan pembukaan masa sidang III Tahun Dinas 2025, dengan agenda rapat, pembacaan surat-surat masuk yang diajukan oleh pihak eksekutif untuk dituangkan dalam agenda pembahasan DPRD Kota Bima pada masa Sidang III Tahun Dinas 2025. Surat Walikota Bima Nomor 100.3/224/V/2025. Tanggal 20 Mei 2025, dengan perihal penyampaian agenda kegiatan dan usul pembahasan RAPERDA masa sidang III Tahun Dinas 2025.

Usulan ini bertujuan untuk di akomodir menjadi pembahasan DPRD Kota Bima pada Masa Sidang III Tahun 2025.

Adapun perihal yang diusulkan oleh pihak eksekutif adalah sebagai berikut, pertama KUA dan PPAS perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2025. Kedua, KUA dan PPAS Kota Bima Tahun Anggaran 2026. Ketiga, rancangan Peraturan Daerah Kota Bima yang terdiri dari A. Raperda Kota Bima tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2024. B. Raperda Kota Bima tentang Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2025. dan C. Raperda Kota Bima tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025/2029.

Rapat DPRD Kota Bima ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh pimpinan rapat paripurna, sebagai tanda resmi pergantian masa sidang.